

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

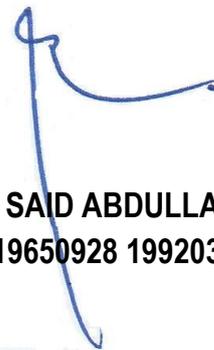
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target anggaran, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan telah di perbaharui dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan Daerah;.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta bertanggungjawab.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022.

Banjarbaru, 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si.
NIP. 19650928 199203 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Memuat hasil kompilasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan	1
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN II	
Memuat hasil kompilasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan	6
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
Memuat kebijakan ekonomi dan keuangan daerah	31
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
Memuat tujuan rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja SKPD, memuat tujuan dan sasaran prioritas pembanguna daerah	32
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan/penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dana yang tidak mengalami perubahan serta proyeksi pendanaan daerah	36
BAB VI PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Perubahan RKPD).

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan SKPD yang melaksanakan penunjang urusan dengan melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

1. Sebagai penyusun kebijakan pemerintah daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan lembaga lain.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
4. Pelaksana fungsi lain yang di berikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai salah satu instansi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang tata kerjanya disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 54 tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagai salah satu instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Sekretariat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 yang sumber pendanaannya dibiayai oleh APBD Perubahan Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja (Renja-Perubahan) Sekretariat Daerah tahun 2022 di susun berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan telah di perbaharui dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan Daerah;.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 536);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan SKPD ini di antaranya :

1. Terwujudnya integritas, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru , meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang di sertai dengan gambaran perubahan kerangka ekonomi.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN II

Memuat hasil kompilasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kebijakan ekonomi dan keuangan daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja SKPD, memuat tujuan dan sasaran prioritas pembanguna daerah

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan/penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dana yang tidak mengalami perubahan serta proyeksi pendanaan daerah.

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN II

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja S/D triwulan II dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sampai dengan triwulan II Tahun 2022 serta evaluasi pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data dan informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

Dibandingkan dengan pencapaian yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat.

Secara keseluruhan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersumber APBD Kota Banjarbaru.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru s/d tw II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realiasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realiasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU							
SETDAKO - BAGIAN UMUM							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	27,34%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda yang tepat waktu		5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	23,16%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	80,96%	1 Dokumen	1 Dokumen	44,74%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Dokumen	98,24%	4 Laporan	4 Laporan	47,10%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	96,02%	Orang/bulan	Orang/bulan	51,11%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realiasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realiasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH serta Setdako	100%	73 Stel	99,52%	Paket	Paket	72,69%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	72,20%	Paket	Paket	49,09%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	99,38%	Paket	Paket	53,50%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan berkas dan dokumen	100%	12 Bulan	45,95%	Paket	Paket	43,14%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup Setdako	12 Bulan	12 Bulan	78,98%	Laporan	Laporan	43,39%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realiasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realiasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	1 Tahun	1 Tahun	95,71%	Unit	Unit	18,21%
Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	2 Buah	2 Buah	81,10%	2 Unit	3 Unit	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa kualitas pelayanan umum kantor lainnya						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lingkup Setdako	12 Bulan	12 Bulan	88,85%	Laporan	Laporan	44,60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksana administrasi kepegawian ASN dan Non ASN	12 Bulan	10 Orang	84,03%	Laporan	Laporan	36,25%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realiasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realiasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100%	122 Unit	97,17%	Unit	Unit	37,36%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	2 Unit	2 Unit	44,45%	Unit	Unit	35,52%
Pemeliharaan Mebel	Persentase Mebel yang dipelihara	1 tahun	4 Jenis	95,83%	Unit	Unit	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Bulan	9 Jenis	80,61%	Unit	Unit	42,68%
Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	5 Jenis	20 jenis	90,31%	Unit	Unit	44,32%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realiasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realiasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan						
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	n/a	12 Bulan	100%	Paket	Paket	41,67%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas/baik						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	n/a	n/a	n/a	Orang/bulan	Orang/bulan	51,29%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realiasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realiasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kualitas kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi						
Fasilitasi Keprotokolan	Persentase keprotokolan pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	51,24%	Laporan	Laporan	19,44%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	77,83%	Laporan	Laporan	29,39%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase tugas pimpinan yang didokumentasi	12 Bulan	12 Bulan	88,93	Laporan	Laporan	35,22%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN ORGANISASI							
Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi						
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah pembinaan kelembagaan SKPD yang dilaksanakan	10 Laporan	10 Laporan	96,81%	Dokumen	Dokumen	31,38%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah pembinaan SAKIP dan RB yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	74,54%	1 Dokumen	1 Dokumen	12,01%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah ketentuan pelaksana pelayanan yang terfasilitasi	5 SKPD	5 SKPD	92,60%	Laporan	Laporan	24,42%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN PEMERINTAHAN							
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi						
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah monev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	86,73%	Dokumen	Dokumen	40,42%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah koordinasi kewilayahan kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	5 Kecamatan / 20 Kelurahan	5 Kecamatan / 20 Kelurahan	93,28%	Dokumen	Dokumen	22,89%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	87,51%	Dokumen	Dokumen	38,30%
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi						
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase rencana kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	100%	109,08%	Dokumen	Dokumen	19,90%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi						
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	107,75%	Dokumen	Dokumen	18,29%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	65,65%	Dokumen	Dokumen	15,84%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	62,90%	Dokumen	Dokumen	18,03%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN HUKUM							
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate						
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	7 Raperda	7 Raperda	98,72%	Dokumen	Dokumen	34,78%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			95,94%	Dokumen	Dokumen	44,08%
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum penanganan perkara Pemda yang terfasilitasi	7 Perkara	7 Perkara	91,94%	Kasus	Kasus	31,67%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi						
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah monev kebijakan pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	100%	100%	21,37%	Dokumen	Dokumen	50,66%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monev pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	92,96%	Laporan	Laporan	258,53%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah monev perkembangan UMKM yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	88,10%	Dokumen	Dokumen	0,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi						
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	90,92%	Dokumen	Dokumen	76,87%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah monev pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	94,80%	Laporan	Laporan	53,28%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD tahun 2022 s/d Triwulan II		
		Target Renja SKPD tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
SETDAKO- BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA							
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa	34 SKPD	34 SKPD	75,53%	Dokumen	Dokumen	75,53%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	34 SKPD	34 SKPD	91,99%	Orang	Orang	15,12%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	-	-	-	Dokumen	Dokumen	35,44%

B. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal dan Perubahan RKPD dimaksud untuk membandingkan rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA dan tingkat kinerja yang telah dicapai oleh sekretariat daerah.

Review terhadap rancangan Awal RKPD sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

Tabel Rancangan Awal dan Perubahan RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Umum											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	95,077,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	109,393,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan Setda tepat waktu	2 Dokumen	18,070,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan Setda tepat waktu	2 Dokumen	32,386,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	77,007,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	77,007,000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	13,506,672,745	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	14,424,705,320	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda tepat waktu	1 Dokumen	26,030,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda tepat waktu	1 Dokumen	30,688,100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan Setda tepat waktu	4 Dokumen	26,030,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan Setda tepat waktu	4 Dokumen	31,338,750	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan	13,454,611,395	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan	14,362,678,470	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%	195,475,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%	215,475,000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banjarbaru	Persentase tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH serta Setdako	100 %	195,475,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banjarbaru	Persentase tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH serta Setdako	100 %	215,475,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	7,523,008,723	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	11,278,399,223	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	1,116,321,223	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	1,555,648,723	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Persentase Bahan Logistik kantor yang tersedia	100 %	3,152,497,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Persentase Bahan Logistik kantor yang tersedia	100 %	4,626,560,500	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya penggandaan berkas dan dokumen	12 Bulan	236,250,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya penggandaan berkas dan dokumen	12 Bulan	236,250,000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Persentase perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup Setdako	100 %	3,017,940,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Persentase perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup Setdako	100 %	4,859,940,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	486,416,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	2,528,645,400	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	100 %	486,416,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	100 %	1,388,645,400	
13						Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	4 unit	1,140,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase usulan kepegawaian tepat waktu	100%	4,548,723,300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase usulan kepegawaian tepat waktu	100%	4,808,723,300	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lingkup Setdako	12 Bulan	1,950,895,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lingkup Setdako	12 Bulan	2,210,895,800	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Persentase pelaksana administrasi kepegawian ASN dan Non ASN	100 %	2,597,827,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Persentase pelaksana administrasi kepegawian ASN dan Non ASN	100 %	2,597,827,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	2,494,846,354	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	4,844,830,754	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Persentase kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100 %	301,345,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Persentase kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100 %	350,591,450	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100 %	855,302,554	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	100 %	1,418,791,304	
18	Pemeliharaan Mebel	Banjarbaru	Persentase Mebel yang dipelihara	100 %	12,600,000	Pemeliharaan Mebel	Banjarbaru	Persentase Mebel yang dipelihara	100 %	12,600,000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 %	312,268,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 %	387,518,000	
20	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	100 %	1,013,330,000	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	100 %	2,675,330,000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan	100%	180,000,000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan	100%	180,000,000	
21	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Banjarbaru	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	100 %	180,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Banjarbaru	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	100 %	180,000,000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas/baik	100%	748,364,977	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas/baik	100%	778,633,750	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	748,364,977	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	778,633,750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan											
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase kualitas kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	100%	3,279,582,500	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase kualitas kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	100%	3,355,703,000	
23	Fasilitasi Keprotokolan	Banjarbaru	Persentase keprotokolan pimpinan yang terfasilitasi	100%	2,251,659,500	Fasilitasi Keprotokolan	Banjarbaru	Persentase keprotokolan pimpinan yang terfasilitasi	100%	2,327,780,000	
			Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%				Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%		
24	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Banjarbaru	Persentase fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100 %	551,602,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Banjarbaru	Persentase fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100 %	551,602,000	
25	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Banjarbaru	Persentase tugas pimpinan yang didokumentasi	100 %	476,321,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Banjarbaru	Persentase tugas pimpinan yang didokumentasi	100 %	476,321,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Organisasi											
	Penataan Organisasi		Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi	100%	819,239,000	Penataan Organisasi		Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi	100%	908,514,000	
26	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Banjarbaru	Jumlah pembinaan kelembagaan SKPD yang dilaksanakan	2 Dokumen	317,253,750	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Banjarbaru	Jumlah pembinaan kelembagaan SKPD yang dilaksanakan	2 Dokumen	317,253,750	
27	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Banjarbaru	Jumlah ketentuan pelaksana pelayanan yang terfasilitasi.	5 SKPD	296,987,750	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Banjarbaru	Jumlah ketentuan pelaksana pelayanan yang terfasilitasi.	5 SKPD	386,262,750	
28	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Banjarbaru	Jumlah pembinaan RB yang dilaksanakan	8 Laporan	204,997,500	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Banjarbaru	Jumlah pembinaan RB yang dilaksanakan	8 Laporan	204,997,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Pemerintahan											
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi	100%	894,906,200	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi	100%	1,158,529,200	
29	Penataan Administrasi Pemerintahan	Banjarbaru	Jumlah monev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas yang dilaksanakan	1 Kali	555,018,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Banjarbaru	Jumlah monev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas yang dilaksanakan	1 Kali	601,518,000	
30	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Banjarbaru	Jumlah koordinasi kewilayahan kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	12 Kali	207,375,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Banjarbaru	Jumlah koordinasi kewilayahan kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	12 Kali	424,498,000	
31	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Banjarbaru	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	1 Dokumen	132,513,200	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Banjarbaru	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	1 Dokumen	132,513,200	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi	100%	225,462,250	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi	100%	1,244,079,250	
32	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Banjarbaru	Persentase rencana kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	225,462,250	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Banjarbaru	Persentase rencana kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	1,244,079,250	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Kesejahteraan Rakyat											
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	100%	6,352,305,350	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	100%	6,502,304,950	
33	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Banjarbaru	Pelaksanaan peribadatan keagamaan	1 Tahun	2,127,607,100	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Banjarbaru	Jumlah koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakann	30 Kali	2,127,606,700	
34	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	Jumlah silaturahmi dan pengembangan sosial budaya	2 Kali	3,034,207,500	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	11 Kali	3,034,207,500	
35	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Banjarbaru	Jumlah evaluasi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi	1 Kali	1,190,490,750	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Banjarbaru	jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	9 Kali	1,340,490,750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Hukum											
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate	100%	1,163,461,550	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate	100%	1,211,511,550	
36	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Banjarbaru	persentase penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	9 Raperda	431,558,300	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Banjarbaru	persentase penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	9 Raperda	436,558,300	
37	Fasilitasi Bantuan Hukum	Banjarbaru	persentase bantuan hukum penanganan perkara pemda yang terfasilitasi	7 Perkara	503,132,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Banjarbaru	persentase bantuan hukum penanganan perkara pemda yang terfasilitasi	7 Perkara	503,132,000	
38	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Banjarbaru	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 website	228,771,250	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Banjarbaru	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	271,821,250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Perekonomian dan SDA											
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi	100%	204,816,850	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi	100%	241,716,850	
39	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Banjarbaru	Jumlah Monev kebijakan pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	11 Laporan	85,951,850	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Banjarbaru	Jumlah Monev kebijakan pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	11 Laporan	85,951,850	
40	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Banjarbaru	Jumlah monev pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	4 Kali	96,630,750	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Banjarbaru	Jumlah monev pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	4 Kali	133,530,750	
41	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Banjarbaru	Jumlah Monev perkembangan UMKM yang dilaksanakan	4 Kali	22,234,250	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Banjarbaru	Jumlah Monev perkembangan UMKM yang dilaksanakan	4 Kali	22,234,250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Administrasi Pembangunan											
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi	100 %	763,815,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi	100 %	1,009,065,000	
42	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Banjarbaru	jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	2 Kali	38,169,250	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Banjarbaru	jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	2 Kali	38,169,250	
43	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Banjarbaru	Jumlah monev pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	6 Dokumen	725,645,750	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Banjarbaru	Jumlah monev pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	6 Dokumen	970,895,750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan sampai tw II					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan	100%	294,164,250	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan	100%	493,624,250	
44	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100,690,250	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100,690,250	
45	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	58,942,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	59,902,000	
46	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Banjarbaru	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	134,532,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Banjarbaru	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	333,032,000	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Perubahan RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 yang tertuang dalam Perubahan Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan maupun rencana strategis, tahun 2022 ini pemerintah daerah pada khususnya masih berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024, yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN 2020-2024 memiliki prinsip dasar membangun kemandirian, menjamin keadilan dan menjaga keberlanjutan. Sebagaimana diuraikan, sebagai modal pembangunan perlu adanya sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi. Selain itu, dalam mewujudkan kemandirian bangsa perlu adanya penguasaan atas IPTEK untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan. Dalam prinsip dasar juga diuraikan bahwa harus adanya keterjaminan akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan.

Pada tahun 2022, Indonesia masih berada pada masa pandemi covid-19. Atas terjadinya pandemi dilakukan penyesuaian anggaran pembangunan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD;
3. Meningkatnya daya beli masyarakat;

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah;
2. Meningkatnya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

4. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD;
5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
6. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat;
7. Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD;
9. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian;
10. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan;
11. Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- 10. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 11. Kegiatan Penataan Organisasi**
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**
 - Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
- 3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
- 4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

- 1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- 2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**
 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 109.393.000
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 32.386.000
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 77.007.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 14.4240705.320
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 14.362.678.470;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 30.688.100;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 31.338.750
3. Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp 778.633.750
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 215.475.000
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 215.475.000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 11.278.399.223
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 1.555.648.723;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 4.626.560.500;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 236.250.000;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.859.940.000
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.528.645.400

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan dengan anggaran sebesar 1.140.000.000
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 1.388.645.400;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 4.808.723.300
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 2.210.895.800;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 2.597.827.500;
8. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 4.844.830.754
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 350.591.450;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 1.418.791.304;
 - c. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 12.600.000;
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 387.518.000
 - e. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 2.675.330.000
9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 180.000.000
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp 180.000.000
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp 3.355.703.000
 - a. Fasilitas Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp 2.327.780.000;
 - b. Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp 551.602.000;
 - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp 476.321.000
11. Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp 908.514.000

- a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 317.253.750;
 - b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 204.997.500
 - c. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar Rp 386.262.750;
12. Administrasi Tata Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 1.158.529.200
- a. Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 601.518.000;
 - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp 424.498.000;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp 132.513.200
13. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.244.079.250
- a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp 1.244.079.250
14. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 6.502.304.950
- a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan anggaran sebesar Rp 2.127.606.700;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 3.034.207.500;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 1.340.490.750
15. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp 1.211.511.550
- a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan anggaran sebesar Rp 436.558.300;
 - b. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp 271.821.250;
 - c. Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp 503.132.000;
16. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp 241.716.850
- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan anggaran sebesar Rp 85.951.850;
 - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp 133.530.750;
 - c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan anggaran sebesar Rp 22.234.250

17. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 1.009.065.000
 - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 38.169.250;
 - b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 970.895.750
18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 493.624.250
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 100.690.250;
 - b. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 59.902.000;
 - c. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp 333.032.000.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru dan mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Tindak lanjut dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan perencanaan yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berdasarkan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dan semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

LAMPIRAN